

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil estimasi model dan akan dihitung pula elastisitas tiap variabel independen untuk mengetahui arah dan besaran pengaruhnya terhadap variabel dependen.

4.1 Hasil Estimasi Model

Dengan estimasi model secara *Fixed Effect Model* yang sudah *Best Linear Unbiased Estimator* (lampiran 4 dan 5), didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1. Hasil estimasi model

Variabel Independen	Variabel Dependen: LOG Penyerapan Tenaga Kerja Berpendidikan Rendah	
	Industri	Perdagangan
Upah Minimum	-0,00075*** (-3,39824)	0,001002*** (8,686591)
Pertumbuhan	0,003529 (0,658358)	0,009673 (0,85443)
Penanaman Modal	0,004208* (1,962012)	-0,00606** (-2,18215)
Penyerapan Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi	0,007549*** (3,505958)	0,003388*** (5,38121)
Populasi angkatan kerja	-0,13693** (-2,34036)	-0,04036* (-1,88938)
R^2	0,997644	0,995335
<i>F-statistic</i>	965,9301***	486,759***
N	106	106

Keterangan: *** signifikan pada $\alpha = 1 \%$,

** signifikan pada $\alpha = 5 \%$,

* signifikan pada $\alpha = 10 \%$

Hasil estimasi baik pada sektor industri maupun perdagangan menunjukkan bahwa kedua nilai koefisien variabel independen memiliki koefisien determinasi (R^2) yang tinggi. Di sektor industri nilainya sebesar 0,997644. Artinya, secara statistik 99,76 persen variabel independen dalam model penelitian ini, yaitu upah minimum, pertumbuhan ekonomi, penanaman modal, penyerapan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, dan populasi angkatan kerja mampu menjelaskan perilaku variabel dependen, yaitu penyerapan tenaga kerja yang berpendidikan rendah.

Sedangkan di sektor perdagangan koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0,995335. Artinya, secara statistik 99,53 persen variabel independen dalam model penelitian ini mampu menjelaskan perilaku variabel dependennya.

Berdasarkan uji t, baik di sektor industri maupun perdagangan diketahui bahwa variabel upah minimum, penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi, penanaman modal dan populasi angkatan kerja secara statistik signifikan mempengaruhi variabel penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah di 27 provinsi¹. Adapun variabel pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya variabel yang secara statistik tidak signifikan memengaruhi penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah baik di sektor industri maupun perdagangan.

Berdasarkan uji F, dengan tingkat kepercayaan 99 persen secara statistik kelima variabel independen di sektor baik industri maupun perdagangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.²

Koefisien determinasi pada kedua model ini yang sama-sama tinggi menunjukkan variabel-variabel independen sudah baik dalam meramalkan variabel dependen. Sebuah garis regresi dikatakan baik jika nilai R^2 tinggi, dan sebaliknya jika nilai R^2 rendah maka mempunyai garis regresi yang kurang baik.

¹ t tabel (0,01, 100) = 2,617; t tabel (0,05, 100) = 1,980; sedangkan t tabel (0,1, 100) = 1,658. Jika t statistik > t tabel, maka tolak H_0 , secara individu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

² F tabel $\alpha=0,01$ dan df (5,100) = 3,17. Jika F statistik > F tabel, maka tolak H_0 , secara bersama-sama variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

4.2. Pembahasan

Variabel upah minimum yang diuji dalam model penelitian ini memiliki pengaruh yang berbeda dalam menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah baik pada sektor industri maupun perdagangan. Pada sektor industri, upah minimum berpengaruh secara negatif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen. Sedangkan pada sektor perdagangan upah minimum berpengaruh positif dan juga signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen.

Hal ini berarti, perubahan penyerapan tenaga kerja yang berpendidikan rendah di sektor industri salah satunya ditentukan oleh faktor kenaikan upah minimum. Kenaikan upah minimum menyebabkan sektor industri mengurangi penyerapan tenaga kerja yang berpendidikan rendah, dan ini secara statistik signifikan. Perubahan penyerapan tenaga kerja yang berpendidikan rendah di sektor perdagangan juga dipengaruhi oleh upah minimum. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berpendidikan rendah, dan ini juga secara statistik signifikan. Hasil-hasil ini diperoleh setelah mengontrol variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, nilai dari aktivitas penanam modal, penyerapan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (*high skill*), dan populasi angkatan kerja.

Hasil estimasi yang berbeda antara sektor industri dengan sektor perdagangan ini mengonfirmasi perdebatan mengenai dampak kenaikan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja. Di satu sisi, kenaikan upah minimum dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja, tetapi di sisi lain justru meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pada banyak studi literatur dan penelitian terdahulu, kenaikan upah minimum berdampak negatif terhadap tenaga kerja, terutama salah satunya pada kelompok pekerja yang berpendidikan rendah (antara lain SMERU, 2001; Bird dan Manning, 2003). Penelitian-penelitian yang menghasilkan dampak negatif upah minimum memang umumnya dilakukan di sektor-sektor industri, sehingga bisa dikatakan hasil pada penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu.

Dampak negatif upah minimum di sektor industri merupakan indikasi bahwa pasar tenaga kerja di sektor tersebut cenderung kompetitif. Artinya, upah minimum yang ditetapkan sudah *binding*, berada di atas upah keseimbangan. Hal ini memiliki

implikasi bahwa peningkatan upah minimum yang terlalu tinggi di atas upah keseimbangan dapat berakibat buruk pada penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Sebaliknya, dampak positif upah minimum di sektor perdagangan memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan *pertama*, pasar tenaga kerja di sektor perdagangan memiliki sifat monopsoni, terutama dalam hal penerapan upah di bawah tingkat upah yang seharusnya, yaitu ketika *marginal cost* sama dengan *marginal revenue*. Kemungkinan *kedua*, pasar tenaga kerja di sektor perdagangan cenderung bersifat informal, di mana terjadi tambahan suplai tenaga kerja di sektor ini ketika terjadi penurunan permintaan tenaga kerja di sektor industri.

Berkurangnya penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor industri dan sebaliknya di sektor perdagangan mengindikasikan ada proses migrasi atau perpindahan tenaga kerja dari sektor industri ke sektor lain termasuk sektor perdagangan. Hal ini bisa juga disebabkan karena sektor industri lebih banyak membutuhkan spesifikasi lebih tinggi yang berimplikasi pada tuntutan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi ketimbang di sektor perdagangan yang spesifikasinya mungkin lebih rendah.

Kondisi ini bisa dikaitkan dengan tahapan industrialisasi yang tengah dialami Indonesia. Menurut Hill (1996), Indonesia saat ini telah memasuki periode industrialisasi yang mengarah pada padat modal, ditunjukkan oleh investasi dalam bidang industri berat dan penggunaan teknologi yang lebih canggih. Industri manufaktur menjadi sektor yang lebih padat modal dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Sebaliknya, sektor jasa (yang di dalamnya termasuk perdagangan) menjadi sektor yang lebih padat karya.

Konsekuensi dari perekonomian yang beralih ke industri yang lebih canggih, penggunaan teknologi, dan keterampilan teknis yang lebih tinggi adalah tuntutan pengembangan dan kemampuan tenaga kerja (Thee, 1994). Dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang berpendidikan tinggi untuk industri yang padat modal tersebut. Implikasi bagi tenaga kerja yang berpendidikan tinggi ini adalah upah yang juga tinggi. Sehingga penetapan upah minimum sangat penting untuk menjaga agar tenaga

kerja yang berpendidikan tinggi mendapat kompensasi yang lebih layak dan tidak dieksploitasi.

Sementara itu, sektor perdagangan yang menurut Hill lebih padat karya, perannya meningkat dalam menyediakan lapangan kerja. Hal ini dipicu oleh maraknya kegiatan perekonomian di bidang pertanian, konstruksi, transportasi, dan sektor pemerintah.

4.3. Pengaruh Variabel Lainnya

Hasil estimasi menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor industri dan perdagangan. Namun, pengaruh tersebut secara statistik tidak signifikan.

Hasil ini bisa jadi disebabkan ada variabel lain yang merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi yang lebih mempengaruhi penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah yang tidak teramati atau tercakup dalam model ini. Misalnya kebijakan terkait dengan kebijakan perpajakan, hambatan investasi yang berakibat pada inefisiensi ekonomi (adanya pungutan liar atau suap menyuap), masalah perizinan, atau lainnya. Sehingga bisa jadi pertumbuhan ekonomi bukanlah variabel atau proksi yang baik untuk meramalkan permintaan akan barang dan jasa yang pada akhirnya bisa menarik permintaan akan tenaga kerja.

Laporan dari *Consultative Group on Indonesia* pada Juni 2006 menyebutkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia telah berubah. Dahulu, pertumbuhan ekonomi sebesar 4-5 persen dianggap cukup untuk menyerap tenaga kerja baru. Sekarang, ekonomi harus tumbuh di atas 7 persen untuk menyerap sebanyak 2 juta pekerja. Dalam periode 2003 – 2007, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam rentang 4,8 persen hingga 6,3 persen.

Hasil estimasi pada variabel penanaman modal menunjukkan variabel ini berpengaruh positif pada penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor industri, tetapi negatif di sektor perdagangan. Kedua pengaruh ini secara statistik

signifikan. Perbedaan pengaruh ini bisa jadi disebabkan investasi yang ada yang sifatnya proyek-proyek baru atau perluasan lebih banyak terdapat di sektor industri daripada di sektor perdagangan. Data penanaman modal dalam negeri periode 2003-2007 di sektor industri tumbuh 65,9 persen per tahun. Sementara data penanaman modal asing pada periode yang sama di sektor industri tumbuh 48,2 persen. Adapun di sektor perdagangan, PMDN hanya tumbuh 2,4 persen dan PMA sebesar 9 persen.

Hasil estimasi dan pembahasan di atas memiliki implikasi yang luas terhadap kebijakan upah minimum. Intinya, pemerintah harus menyadari bahwa kebijakan pengupahan tersebut tidak bersifat seragam atau *complete coverage* pada semua jenis tenaga kerja dan semua sektor kegiatan ekonomi.

Hasil ini di satu sisi bisa mengancam buruh di sektor industri oleh karena perusahaan mendapat alasan atau pembenaran untuk tidak menaikkan upah buruh. Pada kondisi ini, perusahaan di sektor industri diuntungkan sementara buruh bisa jadi dirugikan. Sebaliknya, di sektor perdagangan, buruh/tenaga kerja akan selalu menuntut kenaikan upah dengan alasan kenaikan upah minimum justru akan menambah penyerapan tenaga kerja. Pada kondisi ini, perusahaan di sektor perdagangan bisa tidak diuntungkan sementara buruh juga tidak dirugikan. Jika ini terjadi, yang akan dialami pasar tenaga kerja adalah migrasi besar-besaran ke sektor perdagangan. Akibat lebih jauh, kebijakan upah minimum bisa mendiskrimasi pertumbuhan suatu sektor ekonomi, dengan kata lain upah minimum dapat menurunkan daya saing sektor tertentu (industri) karena terjadi migrasi besar-besaran ke sektor lain (perdagangan). Padahal kegiatan perdagangan harus diimbangi dengan produksi dari sektor industri dalam negeri jika tidak ingin barang konsumsi yang diperdagangkan diimpor sepenuhnya dari produksi negara lain.

Hasil estimasi ini belum dapat menjelaskan apakah pengaruh negatif upah minimum di sektor industri mengindikasikan telah terjadi *overvalued* upah pada sektor ini (upah yang ketinggian) atau *undervalued* (upah yang kerendahan) pada sektor perdagangan. Karena sampai sekarang belum ada penelitian yang memberikan informasi agregat pada tingkat berapa upah mencapai titik keseimbangannya, artinya

pada kondisi jumlah tenaga kerja tertentu, upah yang harus diberikan adalah nilai tertentu. Namun demikian, terlihat bahwa terdapat disparitas upah yang cukup lebar antara sektor industri dan perdagangan.

Namun hasil ini juga tidak menyatakan bahwa upah minimum harus tetap (tidak dinaikkan) atau bahkan diturunkan. Karena dalam membuat kebijakan pengupahan, pertimbangan yang melandasinya tidak semata berdasarkan pertimbangan ekonomi (*economic policy*), tetapi juga sebagai pertimbangan sosial (*social policy*) yaitu kebijakan yang memihak pada upaya peningkatan standar hidup pekerja dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, pemerintah dalam menentukan kebijakan pengupahan harus memperhatikan dua sisi, yaitu sisi pengusaha/perusahaan dan sisi tenaga kerja. Bagaimanapun kebijakan upah harus bersifat fleksibel. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah dari sisi pengusaha/perusahaan adalah meningkatkan produktivitas pelaku dunia usaha. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu bertahan dan meningkatkan produksi barang atau jasa, karena hal inilah yang akan meningkatkan permintaan akan tenaga kerja. Banyak cara yang bisa dilakukan, antara lain dengan meningkatkan belanja pemerintah (melalui proyek-proyek infrastruktur), menarik investasi baru atau memperluasnya, memberikan insentif untuk menggairahkan dunia usaha, dan menghapus hambatan-hambatan yang dapat membebani dunia usaha (misalnya pungli, suap menyuap, korupsi, dan inefisiensi lainnya). Sedangkan dari sisi pekerja, yang dapat dilakukan pemerintah adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Caranya, antara lain dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan atau pelatihan yang tujuannya agar tenaga kerja tidak rentan terhadap fluktuasi upah atau kondisi makroekonomi.

4.4 Perhitungan Elastisitas

Untuk dapat membandingkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diperlukan perhitungan elastisitas. Dari hasil perhitungan (**lampiran 6**), diperoleh elastisitas masing-masing variabel independen sebagai berikut:

Tabel 4.2. Elastisitas Variabel Independen

Variabel Independen	Industri	Perdagangan
Upah Minimum	-0,3955	0,5283
Pertumbuhan	0,0158	0,0434
Penanaman Modal	0,0125	-0,0179
Penyerapan Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi	0,0825	0,0393
Populasi angkatan kerja	-0,5066	-0,1493

Elastisitas mengukur sensitivitas variabel penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah jika variabel independen/penjelas berubah. Elastisitas menunjukkan persentase perubahan penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah yang terjadi jika variabel penjelas berubah satu persen atau satu unit. Jika nilai elastisitas dalam harga mutlak lebih dari 1, maka termasuk *elastis*. Sedangkan jika nilai elastisitas dalam harga mutlak antara 0 dan 1, maka termasuk *inelastis*.

Di sektor industri, variabel upah minimum termasuk *inelastis* dengan nilai elastisitas minus 0,3955. Artinya, setiap upah minimum meningkat satu persen akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah di 27 provinsi berkurang sebesar 0,3955 persen, dengan asumsi variabel yang lain adalah konstan. Elastisitas ini didapat setelah mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan jumlah populasi angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan penanaman modal. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian SMERU (2001) yang elastisitasnya sebesar minus 0,2.

Jika elastisitas ini dilihat berdasarkan nominal rupiah, yang terlihat adalah jika upah minimum naik setiap Rp 100.000 akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor industri berkurang sekitar 12.000 orang.

Di sektor perdagangan variabel upah minimum juga *inelastis* dengan nilai elastisitas 0,5283. Artinya, setiap upah minimum meningkat satu persen akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah di 27 provinsi sebesar 0,5283 persen. Jika elastisitas ini dilihat berdasarkan nominal rupiah, dapat dikatakan bahwa jika kenaikan upah minimum sebesar Rp 100.000 akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja bertambah sekitar 8.600 orang.

Tidak elastisitasnya variabel upah minimum ini kemungkinan disebabkan antara lain, upah minimum bukanlah faktor utama penentu penyerapan tenaga kerja atau penciptaan lapangan kerja. Mengacu pada laporan CGI 2006, pertumbuhan lapangan kerja selain ditentukan oleh upah minimum, juga ditentukan oleh faktor-faktor komposisi sektoral pertumbuhan, biaya tenaga kerja relatif terhadap modal, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Kebijakan mana yang baik dari faktor-faktor itu, itulah yang akan paling menentukan penyerapan tenaga kerja. Penyebab inelastis lainnya diduga karena data upah minimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum nominal provinsi yang variasi antar provinsinya sangat besar dan belum menggambarkan upah yang sebenarnya. Juga, belum bisa langsung diperbandingkan dengan tingkat produktivitas pekerja.

Dari kelima variabel independen, tidak ada satu pun variabel baik di sektor industri maupun perdagangan yang elastis karena nilainya yang kurang dari 1.

Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu disebabkan oleh beberapa hal. Dari segi data, data yang digunakan lebih *update* (2003-2007) meskipun rentang waktunya singkat (5 tahun). Hasil juga berbeda karena membandingkan antara dua sektor ekonomi dan data upah minimum yang dipakai adalah data nominal, bukan upah riil yang biasanya lebih banyak digunakan para peneliti lain.